

Analisa Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Studi Kasus : Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah

Jovi Jasril¹, Fathurrahman², Dara Nida Utamie³

^{1,2,3} Universitas Islam Al-Azhar

Correspondent Author: fathurrahmanmaks@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Central Lombok Regency from 2019 to 2023 using several financial ratios: Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Operating Expenditure Ratio, and Capital Expenditure Ratio. The research method is descriptive quantitative, with data collection techniques including observation and document study. The data sources are secondary data and literature review. The results of the analysis show that the financial performance of Central Lombok Regency during the 2019–2023 period is as follows: the region's financial independence is still very low, with an average of 18.8%, indicating a high level of dependence on the central government. Meanwhile, the effectiveness of locally generated revenue (PAD) is considered good, with an effectiveness rate of 117.71%. The harmony of operating expenditures is fairly good, with an average of 67.33%, and the capital expenditure ratio is also fairly good, with an average of 22.91%. To improve financial performance, it is recommended that the local government allocate expenditures more proportionally, optimize resources to increase PAD, and expand potential sectors to reduce dependency on central government funding.

.Key Words: *Financial Independence, PAD Effectiveness, Regional Expenditure.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kinerja Keuangan BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2023 menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Operasional, Rasio Belanja Modal. Metode penelitian berupa kuantitatif deskriptif, teknik pengumpulan data berupa, observasi dan studi dokumen. Dengan sumber data Sekunder dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Lombok Tengah periode 2019–2023. Hasil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah masih sangat rendah rata-ratanya sebesar 18,8% dengan ini Kabupaten Lombok Tengah ketergantungannya sangat tinggi pada pemerintah pusat. Sementara itu, efektivitas PAD tergolong baik karena efektivitasnya diatas 100% sebesar 117,71%. Namun, sedangkan keserasian belanja operasional tergolong cukup baik rata-ratanya sebesar 67,33 dan rasio kerasian belanja modal tergolong cukup baik rata-ratanya sebesar 22,91%. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, pemerintah daerah disarankan mengalokasikan belanja lebih proporsional, mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan PAD, serta memperluas sektor potensial guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, Belanja Daerah

Pendahuluan

Otonomi daerah diterapkan, pemerintah daerah diberi mandat untuk mengawasi sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan kapasitas masing- masing daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah sekarang memiliki lebih banyak kewenangan untuk mengelola sumber daya dan membuat laporan yang bertanggung jawab kepada rakyat

Menurut Isnowati & Masdjojo (2024). Faktor kinerja keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Dwi Saraswati & Yunita Sari Rioni, 2019). Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya (Saragih & Siregar, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian Belanja Operasional, Rasio Keserasian Belanja Modal.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan daerah bergantung terhadap sumber keuangan atau dana eksternal yang di mana semakin tinggi tingkat rasio kemandirian daerah maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terkait dengan bantuan dari pihakpihak luar seperti pemerintah dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019)

Tabel 1. Kriteria Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Untuk menghitung rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan rumus yang membandingkan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat kemudian dikalikan dengan 100%. (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah menjalankan PAD yang sudah direncanakan dibandingkan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, berdasarkan potensi nyata yang dimiliki daerah tersebut. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah. (Halim, 2022:128).

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di rumuskan dengan mempergunakan perbandingan dari jumlah realisasi penerimaan agregat terhadap target yang telah ditentukan, kemudian dikali dengan 100%.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010).

Tabel 3. Kriteria Belanja Operasional Daerah

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasional
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% -80%
Kurang Baik	80 -100%

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kuantitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi dan Studi Dokumen. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data Sekunder dan Studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kuantitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi dan Studi Dokumen Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data Sekunder dan Studi Kepustakaan. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi atau penjelasan kepada peneliti, melainkan dari media perantara berupa foto, buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (Sugiyono 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Lombok Tengah pada tahun 2019 Konsultatif dimulai pada ini Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 203.099.854.513,38 atau 33% Karena berada pada rasio 25%-50% (Konsultatif). Mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 193.954.302.747,12 atau sebesar 13% karena berada pada rasio 0-25% (Instruktif). Mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp 205.662.812.133,00 atau sebesar 12% karena berada pada rasio 0-25% (Instruktif). Mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp 2.305.097.447.739,00 atau sebesar 11,8% karena berada pada rasio 0-25%

(Instruktif). Mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar Rp 367.199.446.978,00 atau sebesar 19,8% (Instruktif).

Tabel 5. Hasil Kemandirian Keuangan Daerah Lombok Tengah

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Hubungan
2019	203.099.854.513,38	6.104.211.000,00	33,4%	Konsultatif
2020	193.954.302.747,12	1.500.902.944.000,00	13,2%	Instruktif
2021	205.662.812.133,00	1.735.632.565.562,00	12,2%	Instruktif
2022	2.305.097.447.739,00	1.832.263.490.000,00	11,8%	Instruktif
2023	367.199.446.978,00	1.848.973.313.867,00	19,8%	Instruktif

Sumber : LRA Kabupaten Lombok Tengah Data Diolah, 2025

Menurut uraian dari perhitungan table dapat di disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tergolong masih sangat rendah mengalami penurunan dan kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki rata-rata kemandirian keuangannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan inruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sagat dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari bantuan pusat. jadi Kemandirian Keuangan Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 Efektif sebesar 99,22% karena persentase 90%-100%, dari tahun 2020 juga efektif walaupun pada tahun 2020 pandemi covid19 namun efektif sebesar 93,19%, untuk tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan menjadi sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari

100% yaitu pada tahun 2021 sebesar 126,11%, pada tahun 2022 sebesar 135,96 dan pada tahun 2023 sebesar 134,15%.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
2019	203.099.854.513,38	204,512,599,142,12	99,22%	Efektif
2020	193.954.302.747,12	206.419.405.625,90	93,10%	Efektif
2021	205.662.812.133,00	163.077.512.900,58	126,11%	Sangat Efektif
2022	324.661.748.370,00	238,785,324,104,33	135,96%	Sangat Efektif
2023	367.199.446.978,00	273,720,834,949,39	134,15%	Sangat Efektif

Sumber : LRA Kabupaten Lombok Tengah Data Diolah, 2025

Menurut uraian dari perhitungan disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa Anggaran PAD Kabupaten Lombok Tengah mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2019-2020 berjalan efektif, diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebesar 99,22%, tahun 2020 sebesar 93,10%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 126,11%, pada tahun 2022 meningkat sebesar 135,96%, dan tahun 2023 adalah sebesar 134,15%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 berjalan Sangat Efektif karena Efektivitasnya masih diatas 100%. Untuk tahun 2019 dan 2020 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 90%. Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasional

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Keserasian Operasional BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah dengan rata-rata sebesar 67,25% dimulai pada tahun 2019 Cukup Baik dimana rasio nya sebesar 46,58% karena dilihat dari intervalnya diantara 40% -80%. Meningkat pada tahun 2020 menjadi Kurang Baik karena dilihat dari intervalnya diantara 80 -100% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 66,64% namun pada tahun 2022 sampai 2023 meningkat sebesar 68,38% - 74,85%.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasional

Tahun	Total Belanja Modal	Anggaran Belanja Daerah	Persentase	Kriteria
2019	1,217,319,704,372.14	2,279,133,654,703.50	53,41%	Baik
2020	296,918,348,467.68	1,842,385,517,395.87	16,11%	Cukup baik
2021	449,033,126,628.00	2,427,774,165,724.00	18,49%	Cukup baik
2022	410,498,253,009.00	2,507,840,739,375.00	16,36%	Cukup baik
2023	245,079,393,914.00	2,401,692,492,280.00	10,20%	Cukup baik

Sumber : LRA Kabupaten Lombok Tengah Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4, Rasio Belanja Keserasian Operasional BAPENDA Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2019, rasio ini tercatat sebesar 46,58%, yang tergolong dalam kategori Cukup Baik karena berada dalam interval 40% - 80%. Pada tahun 2020, rasio meningkat dan tercatat sebagai Kurang Baik dengan angka yang mencapai 80% - 100%, yang menunjukkan adanya peningkatan belanja yang tidak sepenuhnya seimbang dengan pendapatan. Namun, pada tahun 2021, rasio ini mengalami penurunan menjadi 66,64%, yang masih berada dalam kategori Cukup Baik karena angka tersebut masih berada di interval 40% - 80%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2021, rasio ini kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka yang berada di kisaran 68,38% hingga 74,85%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam keserasian antara belanja dan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, rasio ini cenderung menunjukkan tren yang stabil dengan sedikit peningkatan pada tahun-tahun terakhir.

Kesimpulan

Kemitraan dan strategi pemasaran berperan penting dalam memperkuat daya saing destinasi wisata di Yogyakarta di era digital. Kerjasama antara para pelaku industri pariwisata, pemerintah, perusahaan teknologi, serta komunitas setempat memungkinkan terwujudnya kolaborasi dalam menciptakan promosi yang lebih efisien dan kreatif. Misalnya, Keraton Yogyakarta bekerja sama dengan platform digital seperti Traveloka untuk meningkatkan promosi serta menyediakan pengalaman wisata berbasis teknologi, yang tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Strategi pemasaran digital, terutama melalui platform media sosial dan e-commerce, telah menjadi alat utama untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan interaksi dengan para pelancong. Pelaku industri

pariwisata di Yogyakarta memanfaatkan platform media sosial untuk menjalin komunikasi dua arah, melakukan promosi yang kreatif, serta menyediakan informasi yang menarik dan relevan, seperti acara, tips perjalanan, dan konten visual yang mengurangi kebisingan informasi. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan loyalitas para wisatawan, sekaligus memperkuat citra Yogyakarta sebagai destinasi budaya dan pariwisata yang dinamis, baik di level nasional maupun internasional.

Saran

Sebagai saran, pelaku pariwisata di Yogyakarta sebaiknya terus memperkuat kemitraan lintas sektor, baik dengan pelaku usaha lokal, pemerintah, komunitas, maupun perusahaan teknologi, untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Pengelola destinasi wisata perlu mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui kolaborasi dengan influencer, pemanfaatan kata kunci spesifik di mesin pencari, serta pengembangan konten kreatif dan informatif di berbagai platform media sosial agar destinasi lebih mudah ditemukan dan menarik minat wisatawan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan terkait pemasaran digital harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar para pelaku pariwisata mampu mengelola promosi secara mandiri, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis di era digitalisasi.

Daftar Pustaka

- Al-Bakry, M. H. N. (2023). Analisis Potensi Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Persepsi Pedagang Lokal Terhadap Dampak Wisatawan Dalam Peningkatan Pendapatan Di Danau Toba. *Pringgitan*, 4(2), 106. <https://doi.org/10.47256/prg.v4i2.254>
- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2023). Manfaat Literasi Digital Generasi Z sebagai Preferensi Tujuan Wisata dan Promosi Pariwisata. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 377. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1282>
- Aolia, J., Dewi, N. Y. S. D., Agustina, A., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., & Nur'aini. (2024). Transformasi Digital dalam Industri Pariwisata: Tantangan dan Peluang. *Seminar Nasional Paedagoria*, 4, 597–611.
- Dewi, I. C., Soediro, M., & Ricky Sondak, M. (2022). Peluang Digital Marketing Dalam Kebangkitan Pariwisata Di Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(2), 969–974. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i2.43938>
- Dyah, M. (2020). Strategi Pemasaran Digital Bagi Destinasi Wisata. *ETICON*.

- Ernawati, H., & Hananto, K. (2023). Pariwisata Digital: Perspektif dan Agenda Riset Masa Depan. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 144–156.
- Iswanto, D., Handriana, T., Nazwin Rony, A. H., & Sangadji, S. S. (2024). Influencers in Tourism Digital Marketing: A Comprehensive Literature Review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(2), 739–749. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190231>
- Kurniawan, F., & Zauhar, S. (2013). Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 47–55. <https://www.neliti.com/publications/72524/>
- Kurniawan, R. (2024). STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA LOKAL. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9867–9877.
- Kusumah, G. (2023). *Meningkatkan Kunjungan Wisata dengan Digital Marketing yang Efektif*. Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lindiani, L., Registiana, I., Fajrullah, F., & Noviyanti, I. (2024). Analisis Strategi Promosi Bisnis UMKM Coffee Shop Dengan Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(2), 75–93.
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2022). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleELENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Salam, U. (2023). Digital Tourism In ASEAN During Covid-19 Pandemic. *Sosio Dialektika*, 8(2), 153. <https://doi.org/10.31942/sd.v8i2.9798>
- Saputra, G. R., Zaenuri, M., Priyo Purnomo, E., & Dian Fridayani, H. (2019). Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya). *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 298–341. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.896>
- Sitepu, F. A. B., & Atiqah, A. N. (2022). Pengaruh Penerapan Konsep Digitalisasi Di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.47256/kji.v16i1.135>

- Tutik, Nihayah, A. N., Talakua, J. F. D., Pangestika, M. D., Rachman, M. A., & Hermanto, A. (2024). PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(5), 1–10. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i5.26217>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wulandari, S., Sari, D., & Murwani, I. (2018). *Pola Kemitraan Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. 171–190. <http://purbalingganews.net/>
- Zakaria, & Naim. (2025). Tantangan Dan Peluang Ekonomi Digital Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, 1(1), 118–125.